

Hasil Diskusi Klub Baca Badan Bahasa

Lekra dan Geger Pertemuan ke-8 (Rabu, 21 Juni 2017) Pembahas: Prih Suharto

Lekra—singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat—adalah organisasi seniman dan budayawan haluan kiri yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh A.S. Dharta, M.S. Ashar, Henk Ngantung, Arjuna, Joebaar Ajob, Sudharnoto, dan Njoto.

Lekra lahir dan tumbuh seiring suasana Indonesia pada masa itu yang menjadikan politik sebagai panglima. Karena politik dinomorsatukan, kebudayaan pun menjadi sarat politik sekaligus menjadi ajang tarung politik. Tidak ayal lagi, pada zaman itu kesenian dan kebudayaan menjadi alat yang ampuh untuk menarik, menghimpun, dan memengaruhi massa. Jadi, wajar saja kalau partai politik dan organisasi kemasyarakatan mempunyai organisasi atau lembaga kesenian/kebudayaan. Misalnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) mempunyai Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Nahdatul Ulama mempunyai Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), dan Partai Indonesia (Partindo) mempunyai Lembaga Seni Budaya.

Di antara lembaga kebudayaan yang ada ketika itu, Lekra-lah yang paling gemuk. Lekra menarik perhatian banyak seniman dari berbagai lapangan. Macam-macam alasan orang masuk Lekra: tertarik karena keberpihakan Lekra pada rakyat; tertarik karena Lekra menjadi tempat berkumpul seniman top masa itu; ada juga yang tertarik karena Lekra punya fasilitas menyekolahkan orang ke luar negeri.

Pada masa Lekra dan lembaga-lembaga kebudayaan tersebut, rakyat Indonesia terpecah menjadi tiga kelompok besar: nasionalis, agama, dan komunis—biasa disingkat nasakom. Kelompok yang paling dominan adalah komunis. Selanjutnya, pengelompokan mengerucut menjadi dua, yaitu prokomunis dan antikomunis.

Pertarungan ideologi antara kubu pro- dan antikomunis makin seru dan Lekra menjadi primadonanya. Menurut Lekra, seni tidak boleh hanya untuk seni. Seni harus menghamba kepada politik! Yang sibuk berseni bebas, suka bereksperimen, tidak ikut organisasi berarti berseberangan dengan revolusi. Berseberangan dengan revolusi berarti musuh rakyat.

Banyak yang tidak setuju dengan Lekra, di antaranya, adalah tiga budayawan terkemuka ketika itu, yaitu H.B. Yassin, Trisno Sumardjo, dan Wiratmo Soekito yang kemudian membuat Manifes Kebudayaan yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1963. Dalam beberapa bulan Manifes itu mendapat dukungan lebih dari seribu orang dari berbagai daerah seantero negeri.

Hal itu membuat Lekra yang berhaluan kiri dan PKI kesal. Mereka mulai mengintimidasi para pendukung Manifes. Dengan segala cara akhirnya Lekra dan PKI berhasil membuat Presiden Soekarno melarang Manifes yang dianggap dapat melemahkan semangat revolusi rakyat. Akhirnya, pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno menerbitkan larangan terhadap Manifes Kebudayaan.

Larangan tersebut membuat para pendukung Manifes menjadi bulan-bulanan Lekra sampai menjelang pecahnya G-30-S PKI. Meskipun secara resmi Lekra bukan organisasi *onderbouw* PKI, kedekatan yang amat sangat dan kesamaan gaya, apalagi pendirinya yang kemudian tampil sebagai pimpinan teras PKI, akhirnya memunculkan anggapan bahwa Lekra adalah anak kandung PKI.

Setelah kegagalan G-30-S PKI, sebagaimana yang terjadi pada PKI, Lekra pun menjadi sasaran kemarahan. Karya mereka dilarang atau dihancurkan; para aktivis Lekra dihabisi; sebagian diasingkan ke pulau terpencil. Bahkan, tidak sedikit yang tidak pulang dari tempat pengucilan.

Sumber bacaan:

Moeljanto, D.S. dan Taufik Ismail. 1995. Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk. Bandung: Mizan dan Republika.

Tim Tempo. 2014. Lekra dan Geger 1965. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Tim Tempo. 2016. Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara. Cet. ke-3. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Rangkuman hasil diskusi:

1. Pendiri Lekra yang kemudian menjadi pimpinan teras PKI menimbulkan anggapan bahwa Lekra itu adalah PKI. Idealisme Lekra yang menjadikan politik sebagai panglima mengharuskan seni harus mengacu ke politik. Paham komunisme yang menjadi dasar pemikiran Lekra menunggangi seni pertunjukan rakyat untuk mengusung paham bahwa Tuhan itu tidak ada. Kesenian rakyat seperti Sandur di Jawa Timur bahkan menggelar pertunjukkan dengan judul "Gusti Allah Mati".
2. Pemusnahan Lekra akhirnya juga berdampak pada "pemusnahan" seni pertunjukan rakyat, seperti tradisi Sandur di Jawa Timur. Ketika Lekra dinyatakan terlarang, Sandur pun dilarang. Tradisi Sandur mulai muncul kembali pada 1984. Perevitalisasian tradisi ini, disadari atau tidak, akan membangkitkan kembali memori masyarakat tentang PKI dan Lekra. Oleh karena itu, perevitalisasian Sandur harus dibarengi dengan penanaman pemahaman bahwa Sandur yang sesungguhnya adalah Sandur yang tidak menghamba pada politik. Sandur yang asli adalah Sandur yang bebas politik dan berpihak kepada rakyat kecil.
3. PKI dan Lekra menjadi populer pada masanya dengan cara mengenyangkan perut rakyat untuk tujuan politik tertentu. Sejarah perpolitikan seperti itu dapat dihindari pada masa kini (tidak perlu terulang) hanya jika masyarakat mendapatkan pengetahuan atau mengetahui sejarah bangsa dengan baik. Pendidikan sejarah bangsa seharusnya dijadikan sarana untuk mendidik generasi muda dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi lebih bijak dalam menyikapi situasi politik saat ini. Politik yang ditunggangi oleh banyak kepentingan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu hanya akan membawa kehancuran bagi bangsa ini.